

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan menjadi fondasi penting agar individu mampu mengelola pendapatan, merencanakan pengeluaran, serta mengambil keputusan ekonomi yang bijak (Rengga Madya Pranata *et al.*, 2024). Masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang baik cenderung memiliki kemandirian finansial yang lebih tinggi, terhindar dari praktik pinjaman yang merugikan, serta lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi (Alwi *et al.*, 2025). Namun demikian, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih belum optimal. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, mencatat bahwa indeks literasi keuangan umum mencapai 65,43% dengan inklusi 75,02%. Sementara itu, literasi keuangan syariah baru berada di angka 39,11% dengan tingkat inklusi 12,88% (OJK, 2024). Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perkembangan industri keuangan syariah dengan tingkat pemahaman dan pemanfaatan layanan yang tersedia bagi masyarakat.

Kesenjangan literasi keuangan ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Meskipun memiliki kontribusi besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat daya saingnya. Rendahnya produktivitas Rendahnya produktivitas usaha menyebabkan kesulitan dalam pengembangan skala usaha, lemahnya pengelolaan sumber daya berdampak pada rendahnya efisiensi operasional, serta keterbatasan inovasi membuat UMKM kurang adaptif terhadap perubahan pasar. Selain itu, kelemahan dalam pengelolaan keuangan turut memperparah kondisi tersebut, yang tercermin dari kesulitan mengatur arus kas, tidak adanya pencatatan keuangan yang sistematis, serta percampuran antara keuangan pribadi dan keuangan usaha (Hanafi & Ginting, 2024).

Perempuan pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas UMKM. Mereka tidak hanya mengelola rumah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi keluarga melalui berbagai usaha produktif, seperti berdagang hasil laut,

mengolah produk perikanan, membuka warung, hingga mengikuti simpan pinjam kelompok (Setiani & Laelia, 2024). Aktivitas tersebut seharusnya didukung oleh kemampuan literasi keuangan yang memadai agar pendapatan dapat dikelola dengan baik dan usaha yang dijalankan lebih berkelanjutan. Namun, perempuan pesisir masih memiliki keterbatasan dalam memahami produk keuangan formal, menyusun perencanaan keuangan, serta membangun kepercayaan terhadap lembaga keuangan (Iswanto *et al.*, 2025). Kondisi ini menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap mekanisme keuangan non formal, seperti arisan, pinjaman pribadi, atau tengkulak yang memiliki risiko tinggi dan minim perlindungan finansial.

Pada aspek keuangan syariah, hambatan tersebut terlihat semakin jelas. Banyak perempuan pesisir yang belum pemahaman yang memadai mengenai prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, sistem bagi hasil, serta jenis-jenis akad syariah (mudharabah, musyarakah, dan murabahah). Akibatnya, tingkat pemanfaatan lembaga keuangan syariah oleh perempuan pesisir masih relatif rendah, Kondisi ini menjadi kontradiktif mengingat masyarakat Madura secara normatif dikenal religius dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari (Iswanto *et al.*, 2025). Kontradiksi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai religiusitas dan praktik ekonomi, di mana praktik keuangan informal yang telah mengakar justru lebih dipercaya dibandingkan lembaga keuangan syariah.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah pesisir di Pulau Madura yang mencerminkan fenomena tersebut. Struktur perekonomian daerah didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan hasil laut. Data Kabupaten Bangkalan dalam Angka Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah UMKM terus mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya melalui sektor olahan hasil laut, kuliner, dan perdagangan lokal (BPS Bangkalan, 2024). Sebagian besar UMKM tersebut dikelola oleh perempuan pesisir yang menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku usaha. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya teroptimalkan akibat rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi perempuan pesisir di Kabupaten Bangkalan dengan keterbatasan literasi keuangan syariah yang dimiliki, sehingga menegaskan pentingnya penelitian

mengenai literasi keuangan syariah perempuan pesisir terhadap lembaga keuangan syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis literasi keuangan perempuan pesisir pelaku UMKM syariah yang diukur melalui tiga dimensi, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan tingkat literasi keuangan syariah deskriptif, tetapi juga mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara sikap yang relatif positif dan perilaku pemanfaatan lembaga keuangan syariah yang masih rendah pada perempuan pesisir. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan literasi keuangan syariah menggunakan pendekatan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan prioritas strategi yang paling relevan sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi perempuan pesisir pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian literasi keuangan syariah yang tidak hanya berfokus pada pengukuran tingkat literasi, tetapi juga pada perumusan strategi berbasis pengambilan keputusan yang sistematis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan terkait literasi keuangan perempuan pesisir pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi (pengetahuan, sikap, dan perilaku) perempuan pesisir terhadap lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan literasi perempuan pesisir terhadap lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat literasi keuangan syariah (pengetahuan, sikap, dan perilaku) perempuan pesisir di Kabupaten Bangkalan.
2. Merumuskan rekomendasi strategis peningkatan literasi dan pemanfaatan layanan syariah yang relevan secara lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teoritis

Memberikan kontribusi pada kajian literasi keuangan syariah berbasis gender dan wilayah pesisir, serta memperkaya literatur mengenai dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan syariah.

2. Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan syariah menjadi manfaat sebagai rujukan dalam mengembangkan strategi sosialisasi dan inovasi produk yang ramah bagi komunitas pesisir.
- b. Bagi pemerintah daerah, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir.

Bagi masyarakat pesisir, berpotensi memperoleh manfaat melalui peningkatan kapasitas literasi keuangan syariah yang dapat mendukung kemandirian ekonomi keluarga.